



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai rujukan untuk memperjelas dan mempertegas penelitian. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik yang berkaitan dengan golput dalam pemberitaan media yang diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal ilmiah terkait dengan penelitian.

Penelitian pertama merupakan jurnal ilmiah berjudul *Kontestasi Wacana Golput Pada Media Islam Menjelang Pemilu 2009 Analisis Praktik Kewacanaan Pada Majalah Sabili dan Risalah Mujahidin Pasca Fatwa Haram Golput Majelis Ulama Indonesia* yang diteliti oleh Denison Wicaksono dalam jurnal *Dimensia*, sebuah jurnal kajian sosiologi yang diterbitkan Fakultas Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011.

Penelitian ini mencoba menganalisis wacana majalah *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* dalam pemberitaan mengenai golput pasca MUI mengeluarkan fatwa haram golput untuk umat muslim di Indonesia pada pemilu 2009. Pada saat itu, Wicaksono mengatakan fatwa tersebut

menimbulkan pro-kontra di kalangan umat muslim sendiri, di mana ada kelompok-kelompok Islam yang mendukung dan tidak mendukung. Kontroversi ini juga tak luput dari pemberitaan media cetak, khususnya media Islam seperti Sabili dan Risalah Mujahidin. Untuk itu, dalam penelitian ini Wicaksono menggunakan analisis wacana krisis model Fairclough untuk melihat konstruksi wacana pada kedua majalah tersebut. Dalam pandangan konstruktivis, teks atau wacana yang termuat dalam media adalah representasi dari ideologi kelompok tertentu. Media dipandang bukan hanya sebagai penyalur pesan, tetapi juga merupakan subjek yang merekonstruksi realitas, lengkap dengan bias dan keberpihakannya (Wicaksono, 2011, p. 16 & 17).

Penelitian dilakukan secara kualitatif dalam melihat dan memetakan keterlibatan Sabili dan Risalah Mujahidin sebagai media Islam dalam praktik pemberitaan tentang wacana golput pasca keterlibatan MUI. Setelah memetakan posisi ke dua media tersebut, peneliti menganalisis representasi keterlibatan dalam kontestasi pewacanaan mengenai golput. Lewat analisis wacana kritis model Fairclough, Wicaksono menganalisis teks menggunakan 3 dimensi, yakni mikro, meso dan makro. Pada level makro, analisis teks dilakukan dengan analisis framing atau paragdimatif dari Ibnu Hamad, yang memfokuskan teks pada perlakuan atas peristiwa, strategi pengemasan atau framing, serta penggunaan simbol-simbol verbal dan non-verbal untuk dilihat kecenderungan sebuah teks akan dikonstruksi makna yang seperti apa (Wicaksono, 2011, p. 18).

Analisis praktik sosial dan teori Praktik yang diadopsi dari Bourdie, digunakan Wicaksono untuk melengkapi kepustakaan penelitian karena menganalisis pertarungan wacana untuk memperjuangkan wacana. Teori ini digunakan sebagai ranah, pada arena perjuangan simbolik yang sepadan dengan tatanan wacana atau analisis kritis Fairclough (Wicaksono, 2011, p. 18).

Hasil penelitan menunjukkan majalah Sabili sebagai media industri dekat dengan partai politik yakni PKS, Sabili juga mendukung penegakan syariat Islam melalui jalur parlemen, dan mempertimbangan setiap berita (teks) yang akan diturunkan apakah akan menyinggung kelompok pembaca terbesar (PKS) atau tidak. Hal ini sesuai dengan kecenderungan Sabili yang menempati posisi *ortho-doxa* dalam ranah wacana golput apabila dihubungkan dengan *habitus* dengan modal yang dimiliki Sabili (Wicaksono, 2011, p. 26).

Sedangkan majalah Risalah Mujahidin sebagai media komunitas yang cenderung anti partai politik, majalah ini juga tidak mendukung upaya penegakan syariat melalui parlemen dan setiap teks atau berita yang diturunkan merupakan kajian fenomena atau fakta secara syar'i (Wicaksono, 2011, p. 38).

Penelitian yang dilakukan Wicaksono ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni bagaimana media merespon isu golput. Hasil dari penelitian Wicaksono yang menjelaskan

bahwa secara kualitatif, media melakukan konstruksi atas realitas, khususnya dalam hal ini menyinggung fenomena golput, gagasan bahwa media memberikan ruang diskursus yang benar-benar substansi dengan tanpa atau minimnya campur ideologi pemilik kepentingan, dibuktikan tidak mudah tercapai. Untuk itu, penelitian Wicaksono ini menjadi satu hal yang 'psaling bersinggungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, meski metode dalam menjawab paradigma penelitian dilakukan secara berbeda.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah disertasi berjudul *The Content and Tone of the Media Coverage with regard to the Refugee Crisis in Dutch Popular and Quality Newspapers over time* yang diteliti oleh Florine Evers dari Universitas Twente tahun 2016 ini, bertujuan untuk meneliti bagaimana media membingkai liputan isu kemanusiaan, khususnya adalah menyoal imigran. Menurutnya, imigrasi menjadi masalah politik yang penting di beberapa negara Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Ini disebabkan karena meningkatkan jumlah imigran di Eropa. Evers mengatakan liputan media pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sikap imigrasi (Evers, 2016, p. 3).

Penelitian dilakukan dengan menganalisis isi atau konten dari 4 surat kabar di Belanda. Total, 400 berita dari periode awal Juli 2015 hingga April 2016 dari surat kabar De Telegraaf, AD, NRC Handelsblad dan De Volkskrant dianalisis. Periode tersebut dipilih karena Evers mengasumsikan diskusi publik soal imigran mulai ramai, sehingga dalam periode 10 bulan

tersebut mengandung konten yang menarik dan beragam karena menjadi perhatian publik (Evers, 2016, p. 18).

Sehingga, ada tiga pertanyaan dalam penelitian ini. Pertama, apa isi dan nada pemberitaan mengenai imigran? Kedua, Apakah ada perbedaan penggunaan bingkai dan nada dari waktu ke waktu? Apakah ada peristiwa penting yang signifikan? Ketiga, Apakah ada perbedaan dalam penggunaan bingkai dan nada antara koran populer dan koran berkualitas? (Evers, 2016, p. 15).

Skema pengukuran dalam penelitian ini menggunakan lima bingkai media dari Semetko and Valkenburg, yakni bagaimana media meliput *the human interest frame*, *the responsibility frame*, *the conflict frame*, *the economic consequences frame* dan *the morality frame* yang pada setiap berita, dianalisis dengan 19 daftar pertanyaan berskala ya atau tidak. Bingkai-bingkai ini akan digunakan untuk mempelajari liputan media tentang krisis pengungsi, frekuensi bingkai yang digunakan, konten artikel, dan efek yang diduga terjadi pada pembaca. Selanjutnya, pengaruh peristiwa pada penggunaan bingkai dan nada pemberitaan serta variasi dalam penggunaan bingkai juga diteliti (Evers, 2016, p. 18).

Untuk nada pemberitaan, Evers menggunakan pengukuran -2, -1, 0, 1 dan 2 atau dari sangat negatif, negatif, netral, positif dan sangat positif.

Contoh kata negatif misalnya 'kelakuan buruk', 'kegagalan'. Sedangkan kata positif meliputi 'kejujuran', 'kepuasan', 'penghargaan'. Nada netral diukur Evers dengan merujuk kata-kata yang terhindar dari pernyataan

pribadi atau anekdot yang kuat. Uji reliabel dilakukan bersama dua coder, dengan jumlah 40 artikel, di mana dalam waktu 10 bulan dipilih satu artikel per surat kabar dan per bulan. Evers meenentukan sampel ini dengan menggunakan taraf 10% (Evers, 2016, p. 18).

Hasil penelitian menunjukkan liputan media mengenai krisis imigran paling sering dibingkai dengan *the human interest frame* dan *the responsibility frame*. Namun, pada *frame the human interest*, surat kabar populer seperti De Telegraaf dan AD menggunakan bingkai ini lebih tinggi dibandingkan dengan surat kabar berkualitas yakni NRC Handelsblad dan De Volkskrant. Sedangkan nada pemberitaan dalam isu imigran ini cenderung negatif, yang berbeda secara signifikasi sesuai dengan narasumber pemangku kepentingan, tetapi nada liputan di media tidak berbeda secara signifikan antara surat kabar populer dan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa di media, surat kabar populer dan berkualitas melaporkan suaka dan imigrasi dengan cara yang hampir sama (Evers, 2016, p. 40).

Relevansi penelitian yang dilakukan Evers dengan penelitian ini adalah, bagaimana peneliti mengadopsi cara pengukuran nada pemberitaan, atau dalam penelitian disebut sebagai sentimen. Di mana Evers menyatakan bahwa nada berita dapat diukur dengan mengambil dari salah satu nilai -2, -1, 0, 1, dan 2. Namun, untuk menyelaraskan pengkodean dengan konteks penelitian, skala yang diadopsi hanya 1, -1 dan 0. Ini sesuai dengan jumlah sentimen yang diukur dalam penelitian yakni positif, negatif dan netral.

Sehingga, +2 dan -2 tidak digunakan karena sub-dimensi pada penelitian ini tidak mengukur nilai sangat positif dan sangat negatif.

Penelitian terdahulu terakhir yakni disertasi yang dilakukan Daniel J Boches berjudul *What Is "Terrorism?" Social Geometry and The Media Labelling of Political Violence* dari Temple University pada tahun 2016. Penelitian ini bagaimana media membingkai label kekerasan politik, yang dalam kasus ini banyak disebut sebagai terorisme. Dalam penjabarannya ia menuliskan sejak serangan pada 11 September 2011 di World Trade Center dan Pentagon, terorisisme telah mendominasi wacana media. Namun, apa yang merupakan tindakan "teror" itu telah menjadi bahan perdebatan. Disertasi ini mengusulkan tiga formulasi teoretis yang menjelaskan dan memprediksi dalam keadaan apa kekerasan politik dilabeli "terorisisme" di media seperti The New York Times, USA Today, dan Wall Street Journal (Boches, 2016, p. 2).

Boches menjelaskan di era *impartial journalism*, perbedaan penggunaan label untuk menggambarkan tindakan kekerasan politik di media sangat menonjol. Disertasi ini mengevaluasi bagaimana ras, agama, dan jejaring sosial saling terhubung menyusun bagaimana media massa membingkai kekerasan politik. Untuk itu, Boches juga menggunakan teori sosial yakni *social geometry* untuk melihat bagaimana label di media berkembang. Boches mengatakan penelitian ini dilakukan sekaligus untuk memperluas teori tradisi sosiologis murni dengan mengatasi variasi di media. Lebih khusus, Boches berusaha memahami variasi dalam label moral



yang melekat pada tindakan kekerasan politik di media Amerika dengan menganalisis geometri sosial dari berbagai serangan bermotivasi politik. Pada disertasi ini, Boches menantang teori-teori sebelumnya tentang pelabelan dan "terorisme" dengan menunjukkan bahwa penggunaan dinamis "terorisme" untuk menggambarkan kekerasan politik dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip sosiologis yang jelas, dan bukan hanya hasil dari bias budaya dan politik atau kurangnya konsensus dalam mendefinisikan terorisme (Boches, 2016, p. 4, 8, & 10).

Penelitian dilakukan dengan *mix method*. Boches menggunakan analisis isi untuk melihat bagaimana pelabelan di media tersebut, yakni dengan mengidentifikasi sampel 5.170 paragraf dalam 250 artikel. Boches mengumpulkan semua laporan *hardnews* dan *commentaries* yang ditulis tentang setiap peristiwa yang merupakan hasil tulisan jurnalis, dalam 48 jam pertama setelah serangan. Misalnya, Boches mengambil semua artikel yang diterbitkan antara 17 Juni 2015 dan 19 Juni 2015 dalam versi cetak The New York Times, USA Today, dan Wall Street Journal tentang serangan 17 Juni 2015 (Boches, 2016, p. 39).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan label terorisme yang digunakan oleh media, dalam pers elit Amerika kata terror jarang digunakan, tetapi dalam pelabelan netral kata-kata seperti "penembak," "penembakan," dan "mengamuk" untuk memberi label pada kekerasan politik cukup sering digunakan. Simpulan yang dijabarkan Boches juga menjawab bagaimana asumsi ketika tingkat keintiman antara penyerang dan

korban mengurangi keparahan label media meningkat. Analisis kuantitatif yang didapat menunjukkan pola yang jelas, menunjukkan bahwa pelabelan negatif meningkat dengan meningkatnya jarak relasional, yang berkaitan dengan teori sosial yang digunakan (Boches, 2016, p. 97).

Relevansi disertasi Boches dengan skripsi yang sedang dilakukan adalah bagaimana label media diukur dan digunakan sebagai variabel dependen. Boches mengatakan ketika media menyebut tindakan kekerasan politik mereka sering membuat penilaian moral, mengartikulasikan bahwa serangan itu benar atau salah, baik atau buruk (Boches, 2016, p. 4). Pada isu golput, label media yang merujuk pada golput juga banyak ditemukan.

Untuk itu, disertasi Boches dirujuk sebagai cara mengukur label di media. Namun, karena adanya batas konteks penelitian, penelitian ini tidak mengadopsi formulasi dari teori sosiologi dalam disertasi Bosches. Melainkan hanya mempraktikkan bagaimana moral ini diketahui yakni melalui kata atau frasa yang berhubungan dengan serangan atau penyerang. Yang dalam penelitian ini berarti klaim moral yang berhubungan dengan pewacanaan golput. Klaim moral ini hanya menginput kata sifat yang menjelaskan atau merespon golput dengan justifikasi kontrol sosial seperti haram, pengecut, dan lainnya.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kontestasi Wacana Golput Pada Media Islam Menjelang Pemilu 2009 Analisis Praktik Kewacanaan Pada Majalah Sabili dan Risalah Mujahidin Pasca Fatwa Haram Golput Majelis Ulama Indonesia	Denison Wicaksono	Bagaimana Sabili dan Risalah Mujahidin sebagai media Islam merespon fatwa haram golput dari MUI melalui konstruksi teks pemberitannya?	Analisis Kualitatif	Sesuai model Fairclough, praktik kewacanaan Sabili berita yang dipertimbangkan apakah akan menyinggung kelompok pembaca terbesar atau tidak. Sedangkan Risalah Mujahidin lebih mempertimbangkan menerbitkan berita sesuai dengan kajian suatu fenomena atau fakta syar'i
2	<i>The Content and Tone of the Media Coverage with regard to the Refugee Crisis in Dutch Popular and Quality Newspapers over time</i>	Florine Evers	Bagaimana De Telegraaf, AD, NRC Handalesblad dan De Volkskrant meringkai	Analisis Kualitatif	Liputan media mengenai krisis imigran paling sering dibingkai dengan <i>the human interest frame</i> dan <i>the responsibility frame</i> . Sedangkan nada pemberitaan dalam isu

			liputan isu kemanusiaan, khususnya adalah perihal imigran?		imigran ini cenderung negatif, yang berbeda secara signifikan sesuai dengan narasumber pemangku kepentingan.
3	<i>What Is "Terrorism?" Social Geometry and The Media Labelling of Political Violence</i>	Daniel J Boches	Bagaimana media membingkai label kekerasan politik, sehingga dilabeli "terorisme" di The New York Times, USA Today, dan Wall Street Journal?	Mix Method (Kuantitatif dan Kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif Amerika kata terror jarang digunakan, tetapi dalam pelabelan netral kata-kata seperti "penembak," "penembakan," dan "mengamuk" untuk memberi label pada kekerasan politik cukup sering digunakan. Kesimpulan yang dijabarkan Boches juga menjawab bagaimana asumsi ketika tingkat keintiman antara penyerang dan korban

					mengurangi keparahan label media meningkat.
--	--	--	--	--	---

## 2.2 Teori dan Konsep

Perbincangan mengenai golongan putih masif dalam pilpres 2019. Namun, eksistensi golongan putih menjadi salah satu pilihan suara dalam parade perpolitikan di Indonesia masih dilingkupi ketidakleluasaan diaspirasikan di ruang publik. Seperti yang sudah dijabarkan di latar belakang sebelumnya, ketidakleluasaan itu ditandai dengan terjadinya intimidasi atas pilihan golput yang bahkan menasar ranah pribadi pihak penyuar seperti tubuh dan penghinaan hak pilih lain. Padahal, setiap warga berhak untuk menyampaikan pendapat dan memilih pilihan politik yang berbeda-beda.

Sikap golput sebagai salah satu sikap politik juga patut berkontestasi sehingga ruang terhadap suara tersebut tetap bisa terwadahi. Peran media dalam kehidupan berdemokrasi pun, meminjam pernyataan Habermas, bahwa ketersediaan kanal-kanal komunikasi yang tidak terdistorsi merupakan sarana utama pembebasan bagi partisipasi di ranah publik (CIPG, 2013, p. 10).

Untuk itu, penggunaan konsep ruang publik serta framing yang dilakukan dengan metode analisis isi akan dijabarkan sebagai rujukan teoritis untuk melihat bagaimana media menonjolkan isu golput dalam pemberitaannya.

### 2.2.1 Ruang Publik

Habermas, dalam Iswandi, merujuk *The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* mengatakan konsepsi ruang publik diartikan sebagai area di kehidupan sosial di mana individu yang satu dengan individu lain dapat secara bersama-sama dan bebas membahas dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial, yang pada akhirnya bisa memberikan pengaruh politik (Syahputra, 2018, p. 32).

Masih dalam Iswandi, menurut Gerard Hauser, ruang publik didefinisikan sebagai ruang diskursif, di mana berisi masalah kepentingan bersama, dan jika mungkin, juga untuk mencapai pemahaman bersama tentang hal dalam diskursus tersebut (Syahputra, 2018, p. 31).

Sebagai isi dari ruang publik, yakni opini publik, sebuah isu yang penting bisa dilihat dari relevansi kebutuhan dan aspirasi individu. Arti penting isu yang berdasarkan kebutuhan dan aspirasi individu biasanya bersifat ideal. Iswandi mencontohkan isu tersebut seperti isu kesetaraan gender dalam sebuah kampanye politik adalah sesuatu yang dianggap ideal oleh sebagian orang, tetapi sulit diwujudkan apalagi dalam masyarakat yang patriarki. Ini juga berlaku pada isu kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi (Syahputra, 2018, p. 41).

Dalam konteks politik misalnya, arti penting ini (*saliency*) dianggap sebagai satu hal yang relatif penting dalam meninjau sebuah kebijakan politik. Ini dikarenakan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isu penting

untuk beberapa orang saja, tetapi juga karena itu tersebut memang penting. Hal ini kemudian juga dapat dilihat dari apakah sebuah isu itu dibuat seolah-olah penting atau sebaliknya, atau isu justru dianggap tidak penting dan diabaikan (Syahputra, 2018, p. 41).

Pembentukan opini publik dipengaruhi banyak faktor. Khususnya budaya politik dan ideologi negara serta agama. Pemerintahan yang otoriter biasanya cenderung menjadi wilayah yang tertutup sehingga keberadaan opini publik kerap kali dibungkam dan diarahkan. Berbeda dengan negara yang menganut paham liberal, biasanya opini publik terlihat sangat bebas dan terbuka (Syahputra, 2018, p. 43).

Peran agama, tak jauh berbeda. Pengaruh kepada opini publik biasanya berkaitan dengan struktur kuasa. Dalam agama-agama tertentu misalnya, para pemuka agama kadang memiliki pengaruh yang kuat, bahkan cenderung absolut (Syahputra, 2018, p. 43).

Opini dalam ruang publik ini dapat terjadi jika adanya persepsi-persepsi dan kemudian berkembang. Opini publik bukanlah organisasi, sehingga tidak ada pemimpinnya dan mengartikan bahwa opini publik tidak bisa dikendalikan. Namun, karena opini publik diturunkan dari proses sosial, konvergensi seleksi diri, personal dan negosiasi serta merupakan gabungan dari kesalinglingkupan propaganda, iklan, serta retorik media organisasi maupun massa (Syahputra, 2018, p. 36 & 37).

Sehingga secara ideal opini publik merupakan kepentingan publik yang lahir dari konsensus dan berasal dari interaksi sosial antara individu-individu, yang membutuhkan ruang, yakni bernama ruang publik (Syahputra, 2018, p. 31).

Karenanya, ruang publik yang sehat akan melahirkan rumusan kepentingan publik yang nantinya dituangkan pemerintah atau negara dalam produk politik. Habermas menyatakan ruang publik dapat dikatakan jika memenuhi syarat, pertama, adanya pembentukan opini publik. Kedua semua warga negara memiliki akses. Ketiga adanya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, dan menyampaikan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keempat, terbukanya ruang perdebatan atas aturan-aturan umum (Syahputra, 2018, p. 32).

Media massa, sebagai perantara antara publik dan negara, harus menciptakan satu ruang yang setara. Karena antara komunikator (publik) dan komunikan (negara) dalam konsep ruang publik bertemu secara langsung tanpa perantara sehingga kedua belah pihak dapat memahami secara langsung (Syahputra, 2018, p. 85).

### **2.2.2 Framing**

Framing atau bingkai, menurut Eriyanto dapat dianalogikan sebagai bingkai jendela rumah. Bingkai ini di satu sisi dapat menentukan pandangan, tetapi juga bisa membatasi pandangan. Arah pandangan tentu dapat menampilkan realitas yang berbeda. Jika diterapkan dalam media,



penganalogian sebelumnya diartikan sebagai jurnalis meliput peristiwa tidak dengan kepala kosong, peristiwa dilihat dengan jendela atau bingkai tertentu, sehingga akibatnya ada hal yang diberitakan dan yang tidak diberitakan (Eriyanto, 2018, p. 71).

Dalam Eriyanto, Entman menyatakan bahwa realitas sangatlah kompleks. Maka melalui *framing*, media menyederhanakan realitas tersebut dengan melakukan seleksi dan penonjolan isu (Eriyanto, 2018, p. 73).

Pada dasarnya, menurut Eriyanto pun, cara bercerita dalam metode framing tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Maka, ada dua esensi dari analisis framing, yakni pertama, bagaimana peristiwa dimaknai, yang berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis, yang berhubungan dengan aspek pemakaian kata, kalimat atau gambar sebagai pendukung gagasan berita (Eriyanto, 2002, p. 11).

William A. Gamson melihat *framing* sebagai gugusan ide-ide atas suatu peristiwa. Menurut Eriyanto, konsep yang dibangun oleh Gamson lebih luas karena *framing* dinyatakan sebagai yang tidak hanya berkaitan dengan seleksi atau penonjolan, tetapi juga cara berpikir seseorang dalam memahami isu (Eriyanto, 2018, p. 74)

Masih dalam Eriyanto, De Vreese dan Lecheler menyatakan *framing* dalam media terbentuk atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kebijakan redaksi media, bagaimana pola rutinitas media

serta nilai-nilai berita. Sedangkan faktor eksternal mengacu pada pengiklan, konsumen media, intervensi pemilik media, pemerintah, sampai organisasi masyarakat (Eriyanto, 2018, p. 77).

Efek dari *framing* ini, ketika mengonsumsi media, individu akan mengaplikasikan skema yang dimiliki. Karena, media sejak awal secara terus-menerus memberitakan isu dengan bingkai tertentu, sehingga bingkai atau skema yang akan diaktivasi atau digunakan oleh khalayak, ketika melihat peristiwa (Eriyanto, 2018, p. 86).

Setidaknya ada 4 negosiasi skema efek bingkai media ini terhadap individu. Pertama, *framing* memperkuat skema yang sudah dimiliki oleh individu sebelumnya. Kedua, *framing* mengubah skema individu. Ketiga, bingkai media memiliki peran dalam mengaitkan atribut yang awalnya tidak berhubungan, menjadi saling berhubungan. Lalu ke empat, *framing* media berperan untuk menciptakan bingkai yang baru (Eriyanto, 2018, p. 86 & 87).

Pada akhirnya, penelaahan teks media seperti analisis *framing* ini menjadi relevan sebagai cermin yang merefleksikan realitas yang sesungguhnya. Sobur menjelaskan pada analisis subjektivitas normatif, yang membangun pandangan berdasar asumsi-asumsi ideologis, sangat potensial untuk gagal melihat realitas yang sesungguhnya, atau justru menutup mata terhadap realitas yang berlangsung dalam realitas tersebut (Sobur, 2001, p. 159).

Setidaknya ada dua pendekatan dalam framing, Carver menyebutnya dengan bingkai induktif dan bingkai deduktif. Bingkai induktif biasanya digunakan dengan metode kualitatif dalam proses mendefinisikan frame baru, dan mengidentifikasi dan mengelompokkan perangkat framing terkait. Sedangkan, bingkai deduktif, di sisi lain menerapkan skema pembingkai yang sudah mapan, untuk diidentifikasi keberadaan bingkai tersebut. Artinya, skema tersebut bisa diterapkan untuk mengukur terjadinya frame tertentu pada sampel, tentu, secara kuantitatif (Carver, et al., 2013, p. 457)

Dalam penelitian ini, framing yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Merujuk pada apa yang juga dilakukan Carver dalam melihat framing surat kabar terkait gen, penelitian ini juga mengembangkan kerangka variabel untuk melihat *frame* golput di Kompas.com dan Kumparan.

Kerangka frame akan diidentifikasi oleh *coder* dan menerima buku kode untuk memahami bingkai atau *frame* yang dibangun. Framing kuantitatif dalam penelitian ini juga dibantu dengan menggunakan analisis isi. Janssen dalam tesisnya berjudul *A Framing Analysis of Weblogs and Online Newspapers* dari *San Jose State University*, mengutip Ryan, studi pembingkai digabungkan dengan analisis isi karena sifat abstrak dari *frame*. Analisis framing telah dilihat sebagai metode penelitian sekunder dibandingkan dengan studi *frame* lainnya seperti agenda setting dan priming (Janssen, 2010, p. 27).

### 2.2.3 Meliput Golput dengan Framing

Media massa dianggap tidak lebih dari “alat komunikasi” yang netral dan kosong dalam dirinya sendiri. Sobur menyatakan bahwa media massa hanya berisi jika diisi dengan pesan dari komunikator untuk pihak tertentu. Media tidak menunggu peristiwa lalu mengejar, memahami kebenarannya dan memberitakan kepada publik. Media mendahului semua itu, yakni dengan menciptakan peristiwa, menafsirkan dan mengarahkan terbentuknya kebenaran baru, serta tidak selalu melayakni kepentingan pihak tertentu dalam kurun waktu yang dikatakan setia dan terkontrol. Dari hal tersebut, Sobur menambahkan bahwa realitas dan subjek politik menjadi luntur, memang keduanya tidak lenyap, tetapi tidak lagi bisa menjadi otonom, autentik, karena tak lebih penting dari pada yang dikatakan media tentang mereka (Sobur, 2001, p. 33).

Eriyanto mengatakan media bukanlah saluran yang bebas. Media menunjukkan apa yang diliput, apa yang luput, apa yang ditonjolkan serta apa yang dilupakan dalam pemberitannya. Untuk itu, framing dimaknai sebagai analisis yang meneliti bagaimana suatu realitas, yang terdiri dari realitas, aktor, kelompok, atau apa saja, itu dibentuk media. (Eriyanto, 2002, p. 2).

Menurut Sobur, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dalam menulis berita. *Frame* sendiri mengarah pada cara bercerita, atau gugusan ide yang terorganisir sedemikian rupa, serta

menghadirkan makna dari peristiwa yang berkaitan dengan objek dari suatu wacana sebuah pemberitaan (Sobur, 2001, p. 162).

Pada dasarnya, menurut Eriyanto pun, cara bercerita dalam metode framing tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Maka, ada dua esensi dari analisis framing, yakni pertama, bagaimana peristiwa dimaknai, yang berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis, yang berhubungan dengan aspek pemakaian kata, kalimat atau gambar sebagai pendukung gagasan berita (Eriyanto, 2002, p. 11).

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana media menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2001, p. 162).

Penelaahan teks media seperti analisis framing ini menjadi relevan sebagai cermin yang merefleksikan realitas yang sesungguhnya. Sobur menjelaskan pada analisis subjektivitas normatif, yang membangun pandangan berdasar asumsi-asumsi ideologis, sangat potensial untuk gagal melihat realitas yang sesungguhnya, atau justru menutup mata terhadap realitas yang berlangung dalam realitas tersebut (Sobur, 2001, p. 159).

Karenanya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu dengan menggunakan pelbagai strategi wacana, seperti penempatan yang mencolok; di *headline*, halaman depan atau bagian belakang. Juga dalam bentuk pengulangan, pemakaian grafis atau pemakaian label tersentu ketika

menggambarkan suatu peristiwa atau tokoh dalam pemberitaan (Sobur, 2001, p. 164).

Implikasi framing menjadi penting dalam komunikasi politik. Meminjam pemahaman *frames* menurut Entman dalam Siahaan, menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen lain, yang pada akhirnya memungkinkan khalayak memiliki reaksi yang berbeda. Peran yang dimainkan *framing* ini mendesak kekuasaan politik, dan unsur *frame* menjadi kekuasaan yang tercetak (Sobur, 2001, p. 164).

Maka dari itu, bagi media, bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, opini dan informasi saja, tetapi juga untuk menggambarkan realitas, dan menentukan gambaran atau citra dari suatu fenomena yang hendak ditanamkan kepada publik. Pada akhirnya, media memiliki peluang yang sangat besar dalam memberikan makna dan gambaran atas suatu realitas (Sobur, 2001, p. 88).

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki berasumsi bahwa setiap berita memiliki *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. *Frame* dinyatakan berhubungan dengan makna, jadi bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, maka yang perlu dilihat adalah perangkat tanda yang dimunculkan dalam suatu teks (Sobur, 2001, p.175).

Ada dua aspek dalam *framing* menurut Eriyanto, pertama, memilih fakta atau realitas. Proses dalam aspek ini berdasar dari produk asumsi wartawan yang terkandung dua kemungkinan; bagian mana yang ditekankan

dalam realitas dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan tertentu pada aspek tertentu berimplikasi bagi pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa yang bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Aspek kedua yakni menuliskan fakta, proses yang berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih untuk disajikan kepada khalayak. Elemen ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok memiliki kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan memengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas (Eriyanto, 2002, p. 81).

Sesuai dengan berita yang dianalisis dalam penelitian ini, penggunaan analisis isi dilakukan untuk melihat bagaimana isi pemberitaan di Kompas.com dan Kumparan mengenai golput. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak, dan dilakukan secara objektif, sistematis, reliabel dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011, p. 15).

Dalam buku *Analyzing Media Messages Using Quantitative Content Analysis in Research*, analisis isi kuantitatif diartikan sebagai proses pemeriksaan simbol dan komunikasi yang sistematis dan dapat ditiru, yang telah diberi nilai numerik sebelumnya sesuai dengan pengukuran yang valid, kemudian menganalisis hubungan dari nilai-nilai tersebut dengan metode statistik, untuk menggambarkan komunikasi, menarik kesimpulan untuk maknanya, atau dari konteksnya baik dari produksi dan pola konsumsi (Riffe, et al., 2014, p. 19).

Penekanan spada data dalam analisis ini dikarenakan bahwa analisis isi kuantitatif bersifat reduksionis, yang memiliki prosedur pengambilan sampel dan operasional atau pengukuran dari bentuk komunikasi tersebut menjadi sebuah data, yang kemudian diambil kesimpulan (Riffe, et al., 2014, p. 18).

Konten komunikasi dipahami sebagai produk akhir atau bukti dari individu, organisasi, sosial atau konteks lainnya. Validitas akan itu akhirnya dapat dibuktikan dari seberapa dekat konten bisa dihubungkan secara empiris dan teoritis. Konten atau isi dari komunikasi dapat diteliti secara sistematis karena diasumsikan sebagai penyebab dari berbagai proses individu dan efek (Riffe, et al., 2014, p. 10).

Seperti apa yang dikatakan Budd dalam Kriyantono, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat, untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Kriyantono, 2006, p. 232).

Untuk melihat bagaimana pembingkaiannya dilakukan oleh media, khususnya dalam konteks pembingkaiannya isu golput, peneliti menggunakan pengukuran beberapa dimensi, yakni:

#### 1. Frekuensi

Frekuensi adalah keseringan atau kerapnya berita tentang suatu masalah muncul dalam periode tertentu (Prakoso, 2015, p. 20). Dalam penelitian ini frekuensi pemberitaan yang diteliti yaitu untuk melihat seberapa



sering pemberitaan mengenai golput diberitakan. Bagaimana media melakukan frame yang berulang-ulang ini, maka jika semakin besar frekuensinya, akan semakin besar kekuatan terjadinya pembingkaihan (Abreu, 2015, p. 10).

## 2. Sentimen

Dalam distribusi isu, aspek sentimen ini biasanya juga disebut sebagai nada pemberitaan. Menurut Pang dalam Juditha, analisis sentimen atau *opinion mining* diartikan sebagai proses memahami, mengekstrak, dan mengolah data tekstual untuk mendapatkan informasi sentimen di dalam suatu kalimat opini, dengan melihat kecenderungan opini terhadap suatu objek, apakah cenderung negatif atau positif (Juditha, 2017, p. 60).

Meminjam pengertian Burken dalam disertasi Florine Evers berjudul *The Content and Tone of the Media Coverage with regard to the Refugee Crisis in Dutch Popular and Quality Newspapers over time*, isi dari bagaimana pemberitaan berita dilihat dari karakteristik dari arah opini. Sentimen ini, yang termasuk dalam konsep framing dibagi menjadi positif, netral dan negatif (Evers, 2016, p. 10). Berikut penjelasan ketiga kategorisasi arah opini tersebut menurut Kriyantono (2006, p. 245)

### a. Positif

Sikap mendukung atau *favourable* ini dimaksudkan sebagai pernyataan pendapat atau opini yang ditampilkan secara eksplisit ataupun

implisit yang ditandai dengan maksud mendukung, memuji, menyanjung, atau menyetujui isu yang diangkat dalam pemberitaan tersebut.

b. Negatif

Pernyataan atau pendapat yang ditunjukkan menunjukkan sikap tidak mendukung seperti mencela, meremehkan, ataupun menolak terhadap isu yang ditampilkan dalam pemberitaan. Arah sentimen ini juga disebut sebagai *unfavourable*.

c. Netral

Sikap netral yakni jika isu yang ditampilkan dalam pemberitaan tersebut, baik dari pernyataan maupun opininya tidak bersikap memihak.

Untuk mengukur bagaimana ketiga arah opini atau sentimen ini, peneliti menggunakan pengukuran kata sifat yang terdapat di dalam pemberitaan. Kata sifat dalam dimensi positif ditandai dengan beberapa kata sifat seperti hak, tinggi, masif. Dimensi negatif beberapa kata sifat tersebut meliputi kata merugikan, mubazir, pengecut dan haram. Sedangkan untuk dimensi netral yakni kata yang tidak spesifik mengarah terlalu positif atau terlalu negatif.

Penggunaan kata sifat dalam mengukur *news tone* juga dilakukan oleh Florine Evers dalam penelitiannya yang berjudul *The Content and Tone of the Media Coverage with regard to the Refugee Crisis in Dutch Popular and Quality Newspapers over time*. Untuk mengukur pembingkai mengenai

imgiran, Florine menggunakan skala -2 untuk sangat negatif, -1 untuk negatif, 0 untuk netral, 1 untuk positif dan 2 untuk sangat positif. Salah satu contohnya, pengukuran kata sifat di dimensi sangat negatif ditandai dengan kata *worthless* atau tidak berguna, *spreading spear* atau menyebar ketakutan, dan *hateful* atau penuh benci (Evers, 2016, p. 18).

### 3. Label Media

Tonny Perrino dalam artikelnya di *The Daily Progress* yang berjudul *The Use and Abuse of Political Labeling* mengatakan label sebagai semacam istilah linguistik yang timbul dari ketidakmampuan mengatasi hal-hal kompleks dengan lebih tepat. Label dibuat untuk menyederhakan dan membuat hal kompleks tersebut menjadi lebih mudah dikelola. Label mengesampingkan orang-orang dan ide dengan menggunakan bahasa linguistik ini (Perrino, 2012, para 5).

Namun, ketika label digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan mendiskreditkan seseorang atau ide, mereka merupakan orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengeksploitasi emosi dasar (Perrino, 2012, para 11).

Pada konteks politik misalnya, label liberal digunakan untuk menggambarkan sikap terhadap perubahan, seperti pengertian untuk sikap atau sifat berpikiran terbuka, fleksibel dan tidak dogmatis. Atau dapat juga merujuk sebagai hanya paradigma, yakni berpandangan liberal. Tetapi jika pandangan tersebut dipegang dengan doktrin yang kuat maka pengertian dari

label liberal dapat berkebalikan dari penggambaran sebelumnya atau yang biasa disebut konservatif (Perrino, 2012, para 7 & 8).

Dalam media, pelabelan kerap berhubungan langsung antara penyerang dan korban. Boches, dalam disertasinya di University of New Hampshire yang berjudul *What Is "Terrorism?" Social Geometry and The Media Labelling of Political Violence*, menjelaskan bagaimana pelabelan tersebut, ketika tindakan kekerasan politik dianggap sebagai terorisme oleh negara atau bahkan media, label tidak akan berhenti di pengertian itu saja. Ia menggambarkan label terorisme domestik digunakan oleh media Amerika untuk melabeli serangan yang terjadi di benua Amerika Serikat. Sedangkan label terorisme internasional digunakan untuk menggambarkan di mana pelaku serangan kekerasan politik menyerang negara-negara berdaulat (Boches, 2016, p. 16).

Selain itu, dalam kasus kekerasan politik di penelitian ini juga dikatakan bahwa pelabelan di media kerap dikaitkan dengan moral. Seperti penamaan terorisme, penembakan, dan pejuang kemerdekaan atau aksi aktivisme. Boches juga mengatakan beberapa penelitian yang menjelaskan variabel label moral di media menunjukkan ketergantungan media pada bahasa pejabat pemerintahan (Boches, 2016, p. 7 & 9).

Potret dalam negeri, seperti analisa yang dilakukan Heychael (Heychael, 2019, para 21), pelabelan mengenai golput kerap dijadikan pengenalan terhadap penyimpangan atas apa yang dimiliki si pemilih golput

sehingga memiliki pilihan itu, dibanding mengulik apa alasan golput menjadi pilihan politik yang dianggap rasional. Label tersebut meliputi sikap kekanak-kanakan dan tidak beriman, tidak demokratis dan tidak dewasa. Dalam label tidak beriman misalnya, dapat diperhatikan bagaimana institusi keagamaan seperti MUI mengeluarkan fatwa haram golput. Sehingga dari fatwa tersebut, mereka yang golput merupakan bagian dari orang tidak agamis karena melakukan hal yang disebut MUI haram.

Mengacu pada hasil artikel Heychael di atas, pelabelan dalam penelitian ini dianalisis dalam dua dimensi, yakni positif dan negatif. Label negatif ditandai dengan atribut seperti pidana, tidak agamis, tidak nasionalis dan sikap-sikap partisipasi politik yang bernada negatif.

Sementara label positif ditandai dengan hak pilih. Hal ini sesuai dengan apa yang dipublikasikan oleh ICJR atau *Institute For Criminal Justice Reform* yang menyatakan bahwa golput merupakan hak politik warga sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum (ICJR, 2019, para 11).

#### 4. Narasumber

Narasumber sebagai salah satu sumber berita, menurut Hikmat memiliki motif dalam memberikan informasi kepada wartawan. Serta setiap narasumber pun memiliki keberatan-keberatan untuk memberikan informasi kepada wartawan (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006).

Pada penelitian ini, narasumber yang dimaksud dibagi menjadi dua, yakni narasumber resmi dan non-resmi. Narasumber resmi ialah narasumber

dari lembaga atau institusi pemerintahan, yang mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan narasumber non-resmi ialah mereka yang berasal dari non-pemerintahan.

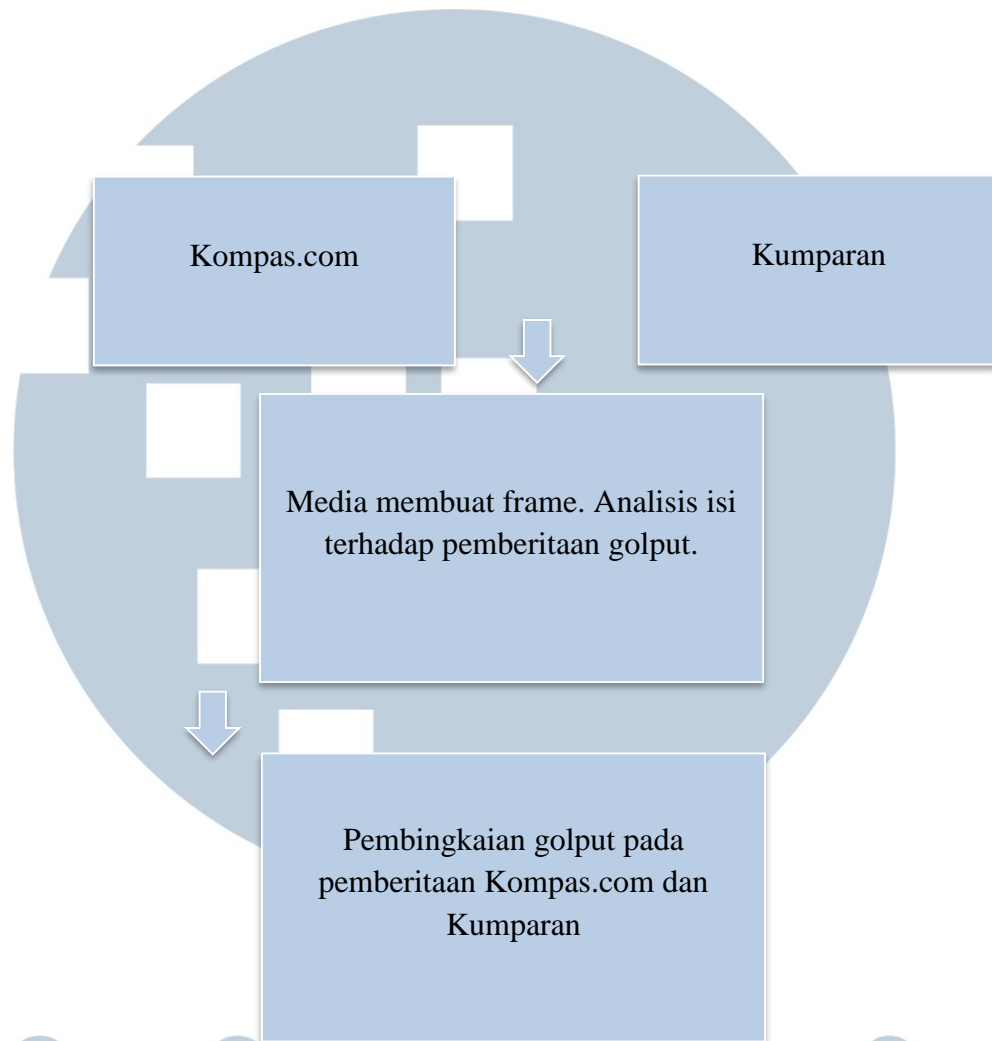
### 2.3 Alur Penelitian

Penelitian yang baik harus sistematis, artinya penelitian harus mengikuti langkah yang teratur. Berikut merupakan diagram alur penelitian yang dimulai dari persiapan dalam menentukan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, tahapan-tahapan hingga akhirnya didapatkan hasil akhir yang ingin dituju.

**Bagan 2.3 Alur Penelitian**

Perbincangan golput mulai masif menjelang pilpres 2019. Namun, terjadi stigmatisasi atas golput.

Isu golput dalam pemberitaan media periode maret 2019



UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA